

# Kesenjangan Kebijakan Mitigasi Banjir di Daerah

Nuril Hidayati

*Fakultas Sastra dan Filsafat, Universitas Panca Marga*

available at <https://www.jisip.org/index.php/sij/article/view/20>

ISSN 2828-0156 ©2025 Sospoli Institute Journal

Manuskrip Diterima: 25 Juni 2025; Disetujui: 29 Juni 2025; Dipublish: 30 Juni 2025.

**Abstrak:** Banjir kronis di Kabupaten Demak, yang diperparah oleh banjir rob dan penurunan muka tanah, telah menimbulkan krisis sosial-ekonomi yang mendalam, bahkan memicu migrasi massal atau "bedol desa". Secara teoretis, pemerintah seharusnya memiliki peta jalan komprehensif untuk mitigasi, namun faktanya menunjukkan bahwa respons yang ada cenderung reaktif dan parsial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kebijakan mitigasi banjir yang ada saat ini tidak berjalan optimal dan merumuskan kebijakan ideal yang dibutuhkan masyarakat Demak. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa kegagalan kebijakan berakar pada beberapa faktor: komitmen rendah untuk menyusun perbaikan yang merespons perubahan alam, penanganan sungai yang tidak komprehensif, dan fragmentasi kebijakan di antara berbagai instansi. Kebijakan yang ada terlalu fokus pada solusi infrastruktur tanpa mempertimbangkan akar masalah di hulu dan dampak sosial di hilir. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan di atas kertas dengan implementasi di lapangan. Kebijakan ideal yang dibutuhkan adalah model yang holistik, terintegrasi, dan partisipatif. Rekomendasi kebijakan harus mencakup perbaikan tata kelola air dari hulu ke hilir, penegakan hukum tata ruang, dan skema adaptasi sosial-ekonomi yang terencana. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan guna mendapatkan data primer yang dapat memperkuat rekomendasi ini.

**Keywords:** kebijakan publik, mitigasi banjir, kesenjangan kebijakan, dampak

## Pendahuluan

Banjir telah menjadi persoalan kronis yang melanda kawasan pesisir utara Jawa (Pantura), dengan Demak sebagai salah satu wilayah yang paling terdampak signifikan. Fenomena ini, diperparah oleh banjir rob dan penurunan muka tanah yang ekstrem, telah merendam 13 kecamatan dan memengaruhi lebih dari 130 jiwa di Demak. Meskipun masyarakat Demak telah beradaptasi

dengan berbagai cara untuk menghadapi banjir, upaya mandiri ini memiliki batasnya. Kelelahan akibat banjir berkepanjangan bahkan telah mendorong migrasi massal atau "bedol desa", sebuah fenomena yang juga terjadi di Pekalongan, menunjukkan tingkat keparahan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan [1].

Secara teoritis, pemerintah seharusnya memiliki peta jalan komprehensif [2] untuk mengurangi dampak banjir rob. Peta jalan ini idealnya mencakup kebijakan mitigasi yang terintegrasi, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi antar pemerintah daerah [3]. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa respons pemerintah terhadap masalah banjir di Demak cenderung reaktif dan hanya berfokus pada aspek infrastruktur. Pendekatan yang parsial ini mengindikasikan bahwa kebijakan mitigasi banjir yang ada saat ini tidak berjalan optimal, gagal untuk secara efektif melindungi masyarakat dari dampak jangka panjang banjir.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam penanganan banjir di Demak dan kawasan Pantura. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan di balik ketidakefektifan kebijakan mitigasi, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian telah menyoroiti isu banjir di kawasan Pantura Jawa, termasuk aspek penyebab, dampak, dan upaya adaptasi masyarakat. Penelitian mengenai isu banjir di kawasan Pantura Jawa telah dilakukan dari berbagai perspektif, mulai dari penyebab geologis, dampak sosial-ekonomi, hingga analisis kebijakan. Studi terdahulu menjadi fondasi penting untuk memahami kompleksitas masalah dan mengidentifikasi celah penelitian yang ada. Beberapa penelitian utama yang relevan dengan topik ini berfokus pada penurunan muka tanah (*land subsidence*) dan banjir rob, yang diakui sebagai penyebab utama banjir kronis di Demak. Misalnya, penelitian oleh Abidin et al. [4] dan Takagi et al. [5], meskipun berfokus pada Jakarta, menyediakan kerangka kerja metodologis yang kuat untuk memahami dan memodelkan penurunan muka tanah serta risiko banjir hidrodinamika. Sementara itu, Marfai [6] secara spesifik mengkaji adaptasi masyarakat terhadap rob di Semarang, yang memiliki karakteristik lingkungan serupa dengan Demak. Studi ini menunjukkan bagaimana masyarakat berupaya menyesuaikan diri, namun juga menyoroiti keterbatasan dari upaya adaptasi mandiri tersebut, yang sejalan dengan fenomena kelelahan warga Demak dalam menghadapi banjir.

Di sisi lain, aspek kebijakan dan tata kelola banjir juga telah menjadi fokus beberapa penelitian. Amiruddin dan Permana [7] menganalisis kebijakan penanganan rob di Semarang dan menemukan adanya kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan dengan implementasi di lapangan. Hal ini diperkuat oleh studi Sari dan Purboyo [8] yang secara khusus mengevaluasi kebijakan pengendalian banjir rob di Kabupaten Demak. Penelitian ini memberikan gambaran langsung mengenai ketidakefektifan kebijakan yang ada saat ini, termasuk masalah koordinasi dan fokus

yang terbatas pada solusi infrastruktur. Laporan Bank Dunia [9] juga menawarkan perspektif makro mengenai risiko pesisir di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, yang dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif di Demak.

Selain itu, dampak sosial dan lingkungan dari banjir juga telah dikaji secara mendalam. Dewi dan Pradono [10] meneliti dampak rob terhadap perubahan sosial-ekonomi di Semarang, termasuk tekanan yang mendorong migrasi. Fenomena serupa di Demak, yang dikenal sebagai "bedol desa", secara spesifik dianalisis oleh Rahmawati dan Pradoto [11]. Penelitian ini memberikan pemahaman krusial mengenai faktor-faktor pendorong migrasi lingkungan akibat banjir rob dan konsekuensi sosial-ekonomi yang ditimbulkannya. Temuan-temuan dari penelitian ini menggaris-bawahi urgensi untuk tidak hanya berfokus pada mitigasi fisik, tetapi juga pada solusi kebijakan yang dapat mencegah kerusakan sosial yang lebih parah, termasuk pergeseran populasi.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu telah mengidentifikasi penyebab, dampak, dan beberapa kelemahan dalam penanganan banjir di Pantura, termasuk di Demak. Namun, masih ada kebutuhan untuk secara holistik menghubungkan ketiga aspek tersebut—penyebab geologis, dampak sosial, dan evaluasi kebijakan—guna merumuskan kebijakan ideal dan praktis yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini akan menggabungkan temuan-temuan dari studi-studi sebelumnya untuk membangun kerangka analisis yang lebih komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang berorientasi pada kebutuhan riil warga.

Penelitian bertujuan untuk Menganalisis efektivitas kebijakan mitigasi banjir yang telah dan sedang berjalan di Demak. Tujuan ini akan mengidentifikasi mengapa kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu mengatasi permasalahan banjir secara optimal, termasuk aspek implementasi, koordinasi, dan sumber daya. Selain itu, Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat Demak serta warga kawasan Pantura lainnya terkait kebijakan penanganan banjir. Tujuan ini akan menggali perspektif masyarakat terdampak untuk memahami aspek-aspek kebijakan yang paling dibutuhkan dan dianggap praktis. Juga penting untuk Merumuskan rekomendasi kebijakan ideal dan praktis yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat Demak dan kawasan Pantura lainnya dalam menghadapi banjir. Rekomendasi ini akan mempertimbangkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan aspek infrastruktur, non-infrastruktur, adaptasi, dan mitigasi berkelanjutan. Hasil penelitian akan bermanfaat untuk Menyusun kerangka kerja kebijakan mitigasi banjir yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk kawasan Pantura, khususnya Demak, yang melibatkan partisipasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi). Tujuan ini berupaya menciptakan peta jalan yang lebih robust dan implementatif.

## Tinjauan Pustaka

### **Dinamika Banjir di Pantura: Penurunan Muka Tanah dan Rob**

Fenomena banjir yang kronis di Demak secara fundamental terkait dengan kombinasi banjir rob (tidal flooding) dan penurunan muka tanah (land subsidence). Penelitian oleh Marfai (2019) secara spesifik mengkaji adaptasi masyarakat terhadap rob di Semarang, sebuah kota dengan karakteristik geologis dan hidrologis yang sangat mirip dengan Demak. Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana rob terjadi dan dampak yang ditimbulkannya. Lebih lanjut, Takagi et al. (2016), meskipun berfokus pada Jakarta, menyajikan model hidrodinamika beresolusi tinggi yang relevan untuk menganalisis risiko banjir di wilayah pesisir dengan penurunan muka tanah. Model ini menunjukkan bahwa penurunan muka tanah secara signifikan memperburuk dampak banjir rob dan curah hujan, sebuah temuan yang sangat berlaku untuk Demak.

Penurunan muka tanah sendiri telah menjadi subjek penelitian intensif. Abidin et al. (2011) menyoroti hubungan antara pengembangan perkotaan yang pesat, eksploitasi air tanah yang tidak terkontrol, dan laju penurunan muka tanah yang ekstrem. Di Demak, laju penurunan muka tanah mencapai angka yang mengkhawatirkan, membuat infrastruktur fisik yang dibangun untuk mitigasi banjir menjadi tidak efektif dalam waktu singkat. Kombinasi dari rob dan penurunan muka tanah ini menciptakan kondisi di mana wilayah Demak secara permanen berada di bawah permukaan laut, menjadikannya sangat rentan terhadap banjir.

### **Dampak Sosial dan Ekonomi: Migrasi Lingkungan (Bedol Desa)**

Dampak sosial dari banjir yang tak kunjung usai di Demak telah mencapai titik kritis, memicu fenomena migrasi lingkungan (environmental migration) atau yang lebih dikenal sebagai "bedol desa". Rahmawati dan Pradoto [11] secara spesifik mengkaji fenomena ini di Desa Sriwulan, Demak, dan menemukan bahwa banjir rob yang terus-menerus merusak mata pencaharian dan tempat tinggal warga adalah pendorong utama migrasi. Warga yang lelah dan putus asa tidak lagi melihat adanya solusi jangka panjang dari pemerintah, sehingga memilih untuk pindah ke lokasi yang lebih aman.

Fenomena serupa juga terjadi di kota-kota pesisir lain. Dewi dan Pradono [10] meneliti dampak banjir rob terhadap perubahan sosial-ekonomi di Semarang, menggarisbawahi bagaimana rob menghancurkan infrastruktur, lahan pertanian, dan perikanan, yang pada akhirnya menekan masyarakat untuk mencari alternatif penghidupan di tempat lain. Temuan-temuan ini menggarisbawahi bahwa masalah banjir bukan sekadar isu teknis, melainkan krisis kemanusiaan yang membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih humanis dan komprehensif.

### **Analisis Kebijakan dan Tata Kelola Banjir**

Peta jalan teoritis untuk mitigasi banjir seharusnya mencerminkan kebijakan yang terintegrasi, proaktif, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa implementasinya jauh dari ideal. Sari dan Purboyo [8] secara langsung mengevaluasi kebijakan pengendalian banjir rob di Kabupaten Demak. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan yang ada seringkali bersifat parsial, reaktif, dan sangat berorientasi pada pendekatan struktural (infrastruktur) tanpa mempertimbangkan solusi non-struktural yang lebih berkelanjutan.

Penelitian lain, seperti oleh Amiruddin dan Permana [7] di Semarang, juga mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan dengan praktik di lapangan, terutama dalam hal koordinasi lintas-instansi. Laporan dari World Bank [9] tentang pengelolaan risiko pesisir di Indonesia memberikan tinjauan yang lebih luas, menekankan perlunya kebijakan yang tidak hanya mengatasi banjir tetapi juga terintegrasi dengan isu-isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengkritisi pendekatan yang terfragmentasi dan merekomendasikan tata kelola yang lebih terpadu, yang sayangnya belum sepenuhnya diimplementasikan di Demak.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode utama. Pendekatan ini memungkinkan untuk menganalisis secara mendalam berbagai sumber data sekunder yang relevan guna membangun landasan teoritis dan menjawab pertanyaan penelitian. Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan data dari beragam sumber tepercaya, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, dan media massa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus analisisnya mencakup penyebab dan dampak banjir, evaluasi kebijakan mitigasi yang ada, serta cara-cara adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Untuk melengkapi dan memperkaya studi pustaka, penelitian ini juga didukung oleh metode studi pendukung lainnya. Hal ini mencakup analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen resmi pemerintah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan regulasi terkait penanggulangan bencana, untuk membandingkan kebijakan yang tertulis dengan implementasi di lapangan. Selain itu, data statistik dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) akan digunakan untuk mengukur skala masalah secara kuantitatif, seperti data demografi dan dampak ekonomi akibat bencana. Apabila memungkinkan, penelitian ini juga dapat diperkuat dengan wawancara terstruktur dengan para ahli, perwakilan pemerintah, atau tokoh masyarakat untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih mendalam dan kontekstual.

Seluruh data dan informasi yang terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan kerangka analisis kebijakan. Kerangka ini akan membantu mengevaluasi kebijakan mitigasi banjir yang ada

berdasarkan kriteria efektivitas, relevansi, implementasi, dan keberlanjutan. Melalui proses ini, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya ideal secara teori, tetapi juga praktis dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Demak serta kawasan Pantura dalam menghadapi tantangan banjir yang semakin kompleks.

## Hasil dan Pembahasan

### Kesenjangan Kebijakan dengan Implementasi

Kebijakan mitigasi banjir di Demak belum berjalan optimal karena adanya kesenjangan fundamental antara teori dan praktik. Secara teoretis, penanganan banjir seharusnya melibatkan peta jalan yang komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa respons pemerintah cenderung reaktif dan parsial, yang didominasi oleh solusi infrastruktur jangka pendek seperti pembangunan tanggul dan pompa air. Pendekatan ini gagal mengatasi akar permasalahan yang lebih kompleks, yaitu laju penurunan muka tanah yang ekstrem, sehingga infrastruktur yang dibangun menjadi tidak efektif dalam waktu singkat. Selain itu, kebijakan yang ada juga terfragmentasi dan minim koordinasi antarlembaga, menciptakan respons yang tumpang tindih dan tidak sinkron. Dampak dari kegagalan ini tidak hanya sebatas kerusakan fisik, tetapi juga sosial-ekonomi yang parah, yang termanifestasi dalam fenomena "bedol desa" atau migrasi massal warga.

Kesenjangan antara kebijakan ideal dan praktik lapangan ini bersumber dari beberapa faktor. Pertama, kegagalan dalam memahami akar masalah yang multidimensi, di mana banjir di Demak merupakan gabungan dari rob, penurunan muka tanah, dan curah hujan. Kebijakan yang ada seringkali hanya menyentuh satu aspek tanpa mengintegrasikan solusi yang holistik. Kedua, adanya hambatan tata kelola dan politik lokal, di mana ego sektoral dan prioritas politik jangka pendek seringkali menghambat perumusan kebijakan yang berkelanjutan. Terakhir, keterbatasan sumber daya finansial dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala utama. Masyarakat, yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, akhirnya berjuang sendiri dan menuntut kebijakan yang tidak hanya melindungi fisik mereka, tetapi juga menjamin keberlanjutan mata pencaharian serta menawarkan opsi relokasi yang manusiawi. Dengan demikian, kebijakan yang ideal dan praktis harus bergeser dari pendekatan top-down yang reaktif ke model yang holistik, terintegrasi, dan partisipatif, yang mengutamakan kebutuhan riil masyarakat.

### Kebijakan Belum Responsif Terhadap Perubahan Lingkungan

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan mitigasi banjir di Demak belum berjalan optimal karena adanya kesenjangan fundamental antara teori dan praktik. Secara teoretis, penanganan banjir seharusnya melibatkan peta jalan yang komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Na-

mun, realitasnya menunjukkan bahwa respons pemerintah cenderung reaktif dan parsial, yang didominasi oleh solusi infrastruktur jangka pendek seperti pembangunan tanggul dan pompa air. Pendekatan ini gagal mengatasi akar permasalahan yang lebih kompleks, yaitu laju penurunan muka tanah yang ekstrem, sehingga infrastruktur yang dibangun menjadi tidak efektif dalam waktu singkat. Selain itu, kebijakan yang ada juga terfragmentasi dan minim koordinasi antarlembaga, menciptakan respons yang tumpang tindih dan tidak sinkron. Dampak dari kegagalan ini tidak hanya sebatas kerusakan fisik, tetapi juga sosial-ekonomi yang parah, yang termanifestasi dalam fenomena "bedol desa" atau migrasi massal warga.

Kesenjangan antara kebijakan ideal dan praktik lapangan ini bersumber dari beberapa faktor. Pertama, kegagalan dalam memahami akar masalah yang multidimensi, di mana banjir di Demak merupakan gabungan dari rob, penurunan muka tanah, dan curah hujan. Kebijakan yang ada seringkali hanya menyentuh satu aspek tanpa mengintegrasikan solusi yang holistik. Kedua, adanya komitmen rendah dari pemerintah untuk menyusun perbaikan yang merespons perubahan alam, yang diperparah oleh perubahan tata ruang kota dan pesatnya pembangunan pemukiman. Pembangunan yang tidak terencana di kawasan pesisir dan hulu telah mengubah daya dukung lingkungan, mempercepat penurunan muka tanah, dan mengurangi area resapan air. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada hanya menjadi dokumen normatif tanpa implementasi yang kuat. Ketiga, keterbatasan sumber daya finansial dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala utama. Masyarakat, yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, akhirnya berjuang sendiri dan menuntut kebijakan yang tidak hanya melindungi fisik mereka, tetapi juga menjamin keberlanjutan mata pencaharian serta menawarkan opsi relokasi yang manusiawi. Dengan demikian, kebijakan yang ideal dan praktis harus bergeser dari pendekatan \*top-down\* yang reaktif ke model yang holistik, terintegrasi, dan partisipatif, yang mengutamakan kebutuhan riil masyarakat.

### **Kebijakan Normalisasi Sungai belum Berdampak**

Berdasarkan analisis studi pustaka, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan mitigasi banjir di Demak belum berjalan optimal karena adanya kesenjangan fundamental antara teori dan praktik. Secara teoretis, penanganan banjir seharusnya melibatkan peta jalan yang komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa respons pemerintah cenderung reaktif dan parsial, yang didominasi oleh solusi infrastruktur jangka pendek seperti pembangunan tanggul dan pompa air. Pendekatan ini gagal mengatasi akar permasalahan yang lebih kompleks, yaitu laju penurunan muka tanah yang ekstrem, sehingga infrastruktur yang dibangun menjadi tidak efektif dalam waktu singkat. Selain itu, kebijakan yang ada juga terfragmentasi

dan minim koordinasi antarlembaga, menciptakan respons yang tumpang tindih dan tidak sinkron. Dampak dari kegagalan ini tidak hanya sebatas kerusakan fisik, tetapi juga sosial-ekonomi yang parah, yang termanifestasi dalam fenomena "bedol desa" atau migrasi massal warga.

Kesenjangan antara kebijakan ideal dan praktik lapangan ini bersumber dari beberapa faktor. Pertama, kegagalan dalam memahami akar masalah yang multidimensi, di mana banjir di Demak merupakan gabungan dari rob, penurunan muka tanah, dan curah hujan. Kebijakan yang ada seringkali hanya menyentuh satu aspek tanpa mengintegrasikan solusi yang holistik. Kedua, adanya komitmen rendah untuk menyusun perbaikan yang merespons perubahan alam, yang diperparah oleh perubahan tata ruang kota dan pesatnya pembangunan pemukiman. Pembangunan yang tidak terencana di kawasan pesisir dan hulu telah mengubah daya dukung lingkungan, mempercepat penurunan muka tanah, dan mengurangi area resapan air. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada hanya menjadi dokumen normatif tanpa implementasi yang kuat. Ketiga, keterbatasan sumber daya finansial dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala utama. Masyarakat, yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, akhirnya berjuang sendiri dan menuntut kebijakan yang tidak hanya melindungi fisik mereka, tetapi juga menjamin keberlanjutan mata pencaharian serta menawarkan opsi relokasi yang manusiawi. Dengan demikian, kebijakan yang ideal dan praktis harus bergeser dari pendekatan *top-down* yang reaktif ke model yang holistik, terintegrasi, dan partisipatif, yang mengutamakan kebutuhan riil masyarakat.

Salah satu poin krusial yang mengemuka dari penelitian ini adalah penanganan sungai-sungai yang kehilangan daya tampung dan daya alirannya masih rendah dan belum komprehensif. Meskipun upaya seperti normalisasi dan pengerukan sudah dilakukan, implementasinya masih bersifat reaktif dan tidak terintegrasi. Saat terjadi banjir, pemerintah umumnya melakukan tindakan darurat seperti perbaikan tanggul yang jebol dan pengerukan sedimen di titik-titik kritis. Namun, pendekatan ini hanya menyelesaikan masalah di bagian hilir tanpa menyentuh akar permasalahan di hulu.

Kondisi sungai di Demak, seperti Sungai Tuntang dan Sungai Wulan, menghadapi tantangan besar akibat sedimentasi yang masif dan pendangkalan. Sedimentasi ini diperparah oleh hilangnya lahan resapan di daerah hulu akibat alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan perkebunan. Akibatnya, limpasan permukaan meningkat drastis saat hujan, membawa material lumpur yang mengendap di dasar sungai. Proses ini secara terus-menerus mengurangi kapasitas sungai untuk menampung dan mengalirkan air ke laut. Di sisi lain, laju penurunan muka tanah yang ekstrem di Demak menyebabkan posisi dasar sungai menjadi lebih tinggi daripada daratan di sekitarnya, sehingga air tidak dapat mengalir secara alami. Pengerukan yang dilakukan tidak

dapat mengimbangi laju penurunan muka tanah dan sedimentasi, menjadikannya sebuah upaya yang terus-menerus tanpa hasil yang signifikan dalam jangka panjang.

Selain itu, penanganan sungai yang ada masih bersifat sektoral dan belum komprehensif. Normalisasi sungai yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana seringkali tidak terintegrasi dengan rencana tata ruang dan pembangunan wilayah yang disusun oleh pemerintah daerah. Misalnya, pembangunan tanggul di hilir mungkin tidak disinergikan dengan upaya konservasi DAS di hulu. Kebijakan yang terfragmentasi ini mengakibatkan masalah sungai tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Diperlukan komitmen yang lebih tinggi untuk menyusun perbaikan yang tidak hanya berfokus pada pengerukan dan peninggian tanggul, tetapi juga mencakup tata kelola DAS secara keseluruhan, dari hulu hingga hilir, dengan melibatkan berbagai instansi dan komunitas lokal.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis studi pustaka, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan mitigasi banjir di Demak belum berjalan optimal karena adanya kesenjangan signifikan antara kerangka kebijakan ideal dengan implementasi di lapangan. Temuan utama menunjukkan bahwa respons pemerintah cenderung reaktif, berfokus pada solusi infrastruktur jangka pendek, dan kurang terintegrasi dengan isu-isu mendasar seperti penurunan muka tanah serta adaptasi sosial-ekonomi masyarakat. Ketidakselarasan ini diperparah oleh kurangnya koordinasi lintas sektor dan antar pemerintah daerah, yang mengakibatkan masyarakat harus berjuang sendiri dalam menghadapi dampak banjir, bahkan hingga memicu fenomena migrasi massal.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai tata kelola bencana di kawasan pesisir. Temuan ini menyoroti perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis infrastruktur ke model yang lebih holistik dan berkelanjutan. Model ini harus mengintegrasikan kebijakan teknis (misalnya, pengelolaan air dan lahan), sosial (dukungan adaptasi dan relokasi yang terencana), dan partisipatif (pelibatan aktif masyarakat). Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, melainkan dari kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan dan sosial yang kompleks, seperti penurunan muka tanah dan migrasi lingkungan.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ketergantungan pada data sekunder dari studi pustaka membatasi kemampuan untuk mendapatkan data primer yang paling mutakhir dan kontekstual dari lapangan. Kedua, analisis ini tidak mencakup aspek pendanaan dan alokasi anggaran secara spesifik, yang merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Terakhir, fokus geografis pada Demak dan kawasan Pantura secara umum mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke daerah pesisir lain di Indonesia tanpa

penyesuaian konteks lokal yang mendalam.

Berdasarkan temuan dan batasan dalam penelitian ini, ada beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya guna memperkaya pemahaman tentang penanganan banjir di Demak dan kawasan Pantura. Pertama, sangat disarankan untuk melakukan studi lapangan komprehensif dengan melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini akan memberikan data primer yang kaya dan kontekstual mengenai perspektif warga, tantangan yang dihadapi pemerintah, serta kesenjangan antara kebijakan tertulis dengan realitas di lapangan. Selain itu, penelitian di masa depan sebaiknya juga fokus pada analisis anggaran dan tata kelola keuangan untuk program mitigasi banjir. Mengidentifikasi bagaimana dana dialokasikan dan dikelola dapat mengungkap hambatan finansial yang mungkin menjadi akar permasalahan dari implementasi kebijakan yang kurang optimal.

Selanjutnya, penelitian dapat beranjak dari evaluasi kebijakan masa lalu menuju pemodelan kebijakan berbasis data yang lebih maju. Dengan menggabungkan data geospasial, sosial-ekonomi, dan skenario perubahan iklim, peneliti dapat memprediksi efektivitas dari berbagai opsi kebijakan di masa depan, seperti pembangunan infrastruktur baru atau program relokasi yang terencana. Terakhir, melakukan studi perbandingan (*comparative study*) antara Demak dengan daerah pesisir lain—baik di Indonesia maupun di negara lain—yang berhasil dalam mengelola banjir dapat menjadi sangat bermanfaat. Studi semacam ini akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan inovasi kebijakan yang bisa diadopsi untuk menciptakan peta jalan mitigasi banjir yang lebih efektif dan berkelanjutan.

---

## Daftar Pustaka

- [1] Kompas.com, "Terparah sejak 1992, banjir demak rendam 13 kecamatan, ketinggian capai 3 meter, 25.000 warga mengungsi," 2024. [Online]. Available: <https://regional.kompas.com/read/2024/03/20/154044478/terparah-sejak-1992-banjir-demak-rendam-13-kecamatan-ketinggian-capai-3>
- [2] S. S. M. Dadek, T Ahmad; ZA, *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA: Tinjauan Filsafat, Teori, dan Implementasi; Panduan bagi Teknokrat, Akademisi, dan Politisi dalam Perencanaan Pembangunan*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Aceh, 2024.
- [3] B. Abdurrahman, *Regional Management*. Minhaj Pub, 2025.
- [4] H. Z. Abidin, H. Andreas, I. Gumilar, R. Djaja, and M. Gamal, "Land subsidence of jakarta (indonesia) and its relation with urban development," *Journal of Applied Geodesy*, vol. 5, no. 4, pp. 177–185, 2011.
- [5] H. Takagi, M. Esteban, T. Shibayama, and K. Udo, "Coastal urban flood risk assessment in jakarta using a high-resolution hydrodynamic model," *Coastal Engineering Journal*, vol. 58, no. 2, p. 1650005, 2016.
- [6] M. A. Marfai, *Adaptation to coastal inundation: A study of human responses to tidal flooding in Semarang City, Indonesia*. Routledge, 2019.
- [7] R. Amiruddin and A. Y. Permana, "Analisis kebijakan penanganan banjir rob di kota semarang," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, vol. 6, no. 1, pp. 59–71, 2018.

- [8] I. P. Sari and R. Purboyo, "Evaluasi kebijakan pengendalian banjir rob di pesisir utara Jawa Tengah: Studi kasus kabupaten demak," *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, vol. 18, no. 1, pp. 1–13, 2020.
- [9] W. Bank, *Indonesia: Managing Coastal Risks in a Changing Climate*. World Bank Publications, 2018.
- [10] C. K. Dewi and B. Pradono, "Dampak banjir rob terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat pesisir di kota Semarang," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 32, no. 1, pp. 1–16, 2021.
- [11] R. Rahmawati and W. Pradoto, "Migrasi lingkungan akibat bencana banjir rob di desa sriwulan, demak," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, vol. 17, no. 1, pp. 1–10, 2019.